

ABSTRACT

ROLE OF PUBLIC RELATIONS IN NON GOVERNMENT ORGANIZATION MAJELIS PENYIMBANG ADAT LAMPUNG (MPAL) (Case Study on Tanggamus Regency of Lampung Province)

**By
IRHAMSYAH KUNDO**

Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) is a non- governmental organization that aims to preserve, conserve, develop and protect the customs and culture of the area of Lampung. In carrying out its activities, MPAL can not be separated from the role of Public Relations (PR). The problem in this research is "How is the role of Public Relations in non government organization Majelis Penyimbang Adat Lampung? "

The object of research was conducted on MPAL. The paradigm used in this research is constructivism, with qualitative research methods. Data collection is carried out by in-depth interviews and documentation. The data were analyzed qualitatively.

The results of this research indicate that MPAL has carried out its role both internally and external to the organization which comprises: (1) The role as communications technician, were conducted by delivering a variety of information on the role as a provider of technical services or communications related to organizational resources and activities (2) The role as Council of Experts, implemented by means of conveying input and advice to local governments in the process of drafting local regulations. (3) The role as a facilitator of communication, be executed by means of a transmitter or government programs aimed at indigenous communities so as to obtain better reception (4) The role as facilitator problem solver, implemented in a way to be a mediator and problem solver in a variety of disputes that occur in people's lives, whether in relation to indigenous issues or other social issues. MPAL most dominant role in Tanggamus is implemented as an expert adviser.

Suggestions in this research are to the Board of Trustees and MPAL suggested improving the socialization of MPAL existence and working program owned by the whole society at large. Local Government advised to intensively pursue the addition of facilities and infrastructure in a way to budget requirements of a technical nature in the field of maintenance culture. MPAL suggested to improve the quality of human resources by recruiting HR really have the knowledge and competence in the field of culture and indigenous Lampung.

ABSTRAK

PERAN HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM ORGANISASI NON PEMERINTAH MAJELIS PENYIMBANG ADAT LAMPUNG (MPAL) (Studi Kasus di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)

**Oleh
IRHAMSYAH KUNDO**

Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) merupakan suatu lembaga non pemerintahan bertujuan untuk menjaga, melestarikan, mengembangkan serta melindungi adat dan budaya daerah Lampung. Dalam melaksanakan kegiatannya, MPAL tidak dapat dilepaskan dari peran Humas. Masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana peran hubungan masyarakat dalam organisasi non pemerintah Majelis Penyimbang Adat Lampung?"

Objek penelitian ini dilaksanakan pada Majelis Penyimbang Adat Lampung Kabupaten. Paradigma penelitian menggunakan penelitian konstruktivisme, dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MPAL telah melaksanakan perannya baik secara internal maupun eksternal organisasi yaitu: (1) Peran sebagai teknisi komunikasi, dilaksanakan dengan cara menyampaikan berbagai informasi mengenai berperan sebagai penyedia layanan teknis komunikasi atau sumber informasi terkait dengan organisasi dan kegiatan (2) Peran sebagai Penasehat Ahli, dilaksanakan dengan cara menyampaikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan produk hukum daerah. (3) Peran sebagai fasilitator komunikasi, dilaksanakan dengan cara menjadi penyampai berbagai program atau kegiatan pemerintah ditujukan kepada komunitas masyarakat adat sehingga memperoleh penerimaan lebih baik (4) Peran sebagai fasilitator pemecah masalah, dilaksanakan dengan cara menjadi mediator dan pemecah masalah dalam berbagai perselisihan dalam kehidupan masyarakat, baik berkaitan dengan masalah adat atau masalah sosial kemasyarakatan lainnya. Peran MPAL paling dominan dilaksanakan di Kabupaten Tanggamus adalah sebagai penasehat ahli.

Saran dalam penelitian ini adalah Kepada Pembina dan Pengurus MPAL disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai eksistensi MPAL dan program kerja dimiliki kepada seluruh lapisan masyarakat luas. Pemerintah Daerah disarankan untuk secara intensif mengupayakan adanya penambahan sarana dan prasarana penunjang dengan cara menganggarkan kebutuhan bersifat teknis dalam bidang pemeliharaan kebudayaan. MPAL disarankan untuk meningkatkan kualitas SDM dengan merekrut SDM benar-benar memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang kebudayaan dan adat Lampung.